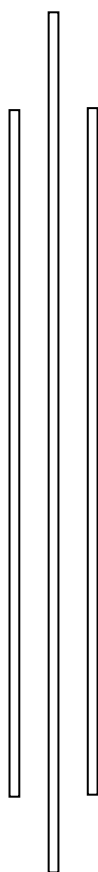




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN	1
DAFTAR ISI.....	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	5
NERACA	6
LAPORAN OPERASIONAL	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II.....	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	6
2. Hambatan dan Kendala.....	7
BAB III.....	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	8
1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja.....	8
a. Pendapatan	8
b. Belanja.....	8
2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	14
a. Aset	14
b. Kewajiban	32

c. Ekuitas.....	33
3. Penjelasan Laporan Operasional.....	33
4. Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	44
BAB IV	46
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	46
1. Penjelasan Umum.....	46
2. Informasi Lainnya.....	46
BAB V.....	47
PENUTUP.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

AGUNG WICAKSONO, SE. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19761023 200212 1 008

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

(diganti Print out Simda)

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
Laporan -SKPD-Pembukuan Akrual-LRA
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
Laporan -SKPD-Pembukuan-LRA
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2025; *Laporan- SKPD-Pembukuan-LRA per Periode* (program kegiatan kosong)
- 4) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2025).
Laporan- SKPD-Pembukuan-LRA per Periode (program kegiatan diisi)

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(diganti Print out Simda)

***LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-NERACA-NERACA SETELAH
PENGGABUNGAN (SAP)***

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

LAPORAN OPERASIONAL

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025

(diganti Print out Simda)

LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-LAPORAN OPERASIONAL-FORMAT 1

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(diganti Print out Simda)

LAPORAN-SKPD-PEMBUKUAN AKRUAL-LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2025 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0 mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 13.144.945.883,83 atau mencapai 94,53% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 2.764.478.859,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 34.356.547,- investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,- aset tetap sebesar Rp. 2.085.585.449,- dana cadangan Rp. 0,- dan aset lainnya sebesar Rp. 644.536.8631,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,-

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.764.478.859,-

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 0,- Beban dari kegiatan Operasional Rp. 13.783.102.687,81 dan defisit sebesar Rp. 13.783.102.687,81.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp. 3.130.001.127,- Defisit Rp. 13.783.102.687,81 dan Ekuitas akhir sebesar Rp. 2.764.478.859,-

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- t. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 1/C);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1

Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C);

- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 9/A);
- ii. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/E);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A) ;
- ll. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7/E);
- mm. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 34/E);
- nn. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 113/A);

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp. 13.905.827.470,- yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan (sesuai di Laporan Simda)	0,00
2.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	13.595.992.670,-
3.	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	309.834.800,-
	Defisit	13.905.827.470,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/2.16.2.21.01.0000/001/2025 tanggal 2024 sebesar Rp. 13.905.827.470,- terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 13.905.827.470,-

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar selama tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja	13.905.827.470,-	13.144.945.883,81	94,53
	- Belanja Operasi	13.595.992.670	12.845.482.733,81	94,48
	- Belanja Modal	309.834.800,-	299.463.150,-	96,65
	Total Belanja	13.905.827.470,-	13.144.945.883,81	94,53

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp 13.144.945.883,81 atau 94,52 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp760.881.586,19 atau 5,47 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.149.9003,-	110.044.971,-	99,9
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.953.278.994,-	3.598.088.883,-	0,00

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,-	34.605.000,-	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.428.883,-	201.140.260,-	0,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.031.000,-	4.575.000,-	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	764.983.972,-	582.052.979,-	0,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.805.550,-	432.687.305,-	0,00
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.451.581.671,-	2.395.798.791,-	0,00
9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.243.426.100,-	4.174.288.143,-	0,00
10	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	475.286.700,-	422.167.012,-	0,00
11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	568.780.600,-	567.321.751,81	0,00
12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	324.239.300,-	322.712.038,-	0,00
	Total	13.905.827.470,-	13.144.945.883,81	94,53

(diisi sesuai dengan kegiatan yang ada dimasing-masing SKPD)

2. Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Aturan Perubahan Anggaran yang baru ditetapkan mendekati akhir tahun menyebabkan rencana kerja yang telah disusun berjalan kurang maksimal;
- b. Kurangnya jumlah SDM pelaksana kegiatan dan kurang maksimalnya kapabilitas SDM yang tersedia.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 serta Realisasi Tahun Anggaran 2024, adalah *NIHIL*.

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00
	(a) Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	(b) Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	(d) Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
B	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00
	(a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	(b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
	(a) Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	(b) Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	(c) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

Untuk Pendapatan yang terealisasi kurang dari 70%, mohon dijelaskan, misal: “Realisasi Pendapatan (per sub rincian obyek) tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp.... atau X persen disebabkan oleh”

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b. Belanja	13.905.827.470,00	15.968.391.352,,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut.

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

1) Belanja Operasi

13.144.945.883,81

15.046.691.232,-

Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 15.046.691.232,- dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
(a)	Belanja Pegawai	3.933.915.300,-	3.578.774.883,-	3.261.127.355,-
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.535.317.300,-	2.250.717.040,-	1.981.631.290,-
	- Belanja Gaji Pokok ASN	1.747.388.000,-	151.917.966,-	137.080.078,-
	- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	172.946.000,-	151.917.966,-	137.080.078,-
	- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.905.000,-	113.695.000,-	141.370.000,-
	- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	92.070.000,-	90.244.000,-	56.404.000,-
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.869.000,-	40.790.000,-	29.375.000,-
	- Belanja Tunjangan Beras ASN	100.444.000,-	90.597.420,-	29.275.000,-
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	78.000.000,-	29.600.072,-	26.201.907,-
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	231.500,-	21.847,00	20.791,-
	- Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	135.596.000,-	115.384.969,-	100.977.903,-
	- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.686.000,-	3.355.497,-	2.873.048,-
	- Belanja luran Jaminan Kematian ASN	11.055.000,-	10.066.569,-	8.619.243,-
	- Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.126.800,-	0,00	0,00
	- Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.398.598.000,-	1.328.057.843,-	1.183.436.065,-
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.352.457.000,-	1.285.572.910,-	937.097.090,-
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	46.141.000,-	42.484.933,-	246.338.975,-
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	96.060.000,-
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Honorarium	0,00	0,00	91.260.000,-
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	4.800.000,-
	- Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	9.662.077.370,-	9.266.707.850,81	11.785.563.877,-
1	Belanja Barang	526.002.527,-	472.954.125,-	1.342.714.182,-
	- Belanja Barang Pakai Habis	526.002.527,-	472.954.125,-	1.296.234.182,-
	- Belanja Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Asset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	46.480.000,-
2	Belanja Jasa	8.075.121.072,-	7.749.870.613,81	8.955.356.977,-
	- Belanja Jasa Kantor	6.005.828.172,-	5.718.994.976,81	6.008.606.577,-
	- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	511.888.100,-	507.789.885,-	336.308.000,-
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.990.000,-	9.750.000,-	0,00
	- Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.547.414.800,-	1.513.335.752,-	2.610.442.400,-
	- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	556.772.500,-	550.597.402,-	417.459.693,-
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.880.000,-	91.008.000,-	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	3.450.000,-	2.400.000,-	18.920.000,-
4	Belanja Perjalanan Dinas	408.851.271,-	399.877.710,-	1.020.033.025
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	408.851.271,-	399.877.710,-	1.020.033.025
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	31.080.000,-
	- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	31.080.000,-
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penunjang Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
(c)	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00	0,00
(d)	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

2) Belanja Modal

299.463.150,-

921.700.120,-

Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2025 Rp. 299.463.150,- dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
(a)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah BOS	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00
(b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.834.800,-	299.463.150,-	921.700.120,-
1	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.802.100,-	7.575.750,-	218.077.120,-
	- Belanja Modal Alat Kantor	4.778.100,-	4.662.000,-	73.250.000,-
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.024.000,-	2.913.750,-	132.627.120,-
	- Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			12.400.000,-
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.643.000,-	4.795.350,-	172.150.000,-
	- Belanja Modal Alat Studio			146.850.000,-
	- Belanja Modal Alat Komunikasi	5.643.000.000,-	4.795.350,-	25.300.000,-
	- Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium		0,00	0,00
	- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Persenjataan		0,00	0,00
	- Belanja Modal Senjata Api	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Senjata Sinar	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Komputer	296.389.700,-	287.092.350,-	531.473.000,-
	- Belanja Modal Komputer Unit	258.482.800,-	251.039.250,-	394.130.000,-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer	37.906.900,-	36.052.800,-	137.343.000,-
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	
	- Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Modal		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2025	2024
	-	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00
13		Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
14		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00
15		Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00
16		Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00
17		Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
18		Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	0,00	0,00
19		Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
20		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
21		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
(c)		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
1		Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
2		Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00
3		Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00
4		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00
5		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	0,00	0,00	0,00
6		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah			309.834.800,-	299.463.150,-	921.700.120,-

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal Rp. 299.463.150,- berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex :Belanja Peralatan dan Mesin Rp0,00 dan Belanja Aset*

Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 yang seharusnya dibebankan pada Belanja Hibah/ Belanja Barang dan Jasa).

2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Aset	0,00	0,00

Saldo Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(1)	Aset Lancar	55.242.719,-	76.795.403,-
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	2.085.585.449,-	4.499.472.626,-
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	644.536.863,-	644.536.863,-
Jumlah Aset		2.785.365.031,-	3.220.804.892,-

31 Desember 2025 (Rp) 2.785.365.031,-	31 Desember 2024 (Rp) 3.220.804.892,-
--	--

1) Aset Lancar

Rp. 55.242.719,- **Rp. 76.795.403,-**

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 55.242.719,- dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(a)	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
(b)	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
(c)	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
(d)	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
(e)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
(f)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
(g)	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
(h)	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
(i)	Piutang Lainnya	0,00	0,00
(j)	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
(k)	Beban Dibayar Dimuka	13.718.082,00	27.848.417,00
(l)	Persediaan	41.524.637,00	48.946.986,00

(m)	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
(n)	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		55.242.719,00	76.795.403,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari ... dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
(a)	Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0,00
	- Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
	- Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00
	- Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00
	- Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
	- Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00
	- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
	- Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	0,00
(b)	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00
	- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
	- Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00
	- Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	0,00

No	Jenis	Nilai (Rp)
-	Piutang Retribusi Terminal	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0,00
-	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00
-	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00
-	Piutang Retribusi Penyeberangan di Air	0,00
-	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00
(c)	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00
-	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00
-	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00
-	Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00
JUMLAH		0,00

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

c) Piutang lain-lain

0,00

0,00

Saldo piutang lain-lain Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
Jumlah		0,00

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

d) Persediaan

41.524.637,00

48.946.986,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil

inventarisasi fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 48.946.986,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00
2	Bahan Kimia	0,00
3	Bahan Peledak	0,00
4	Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00
5	Bahan Baku	0,00
6	Bahan Kimia Nuklir	0,00
7	Barang Dalam Proses	0,00
8	Bahan/Bibit Tanaman	0,00
9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
10	Isi Tabung Gas	0,00
11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00
12	Bahan Lainnya	0,00
13	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
14	Suku Cadang Alat Besar	0,00
15	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
16	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00
17	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00
18	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0,00
19	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00
20	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00
21	Suku Cadang Alat Persenjataan	0,00
22	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0,00
23	Suku Cadang Lainnya	0,00
24	Alat Tulis Kantor	2.678.691,00
25	Kertas Dan Cover	5.331.800,00
26	Bahan Cetak	9.387.434,00
27	Benda Pos	0,00
28	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00
29	Bahan Komputer	11.515.000,00
30	Perabot Kantor	5.443.622,00
31	Alat Listrik	7.168.090,00
32	Perlengkapan Dinas	0,00
33	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	0,00
34	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00
35	Suvenir/Cendera Mata	0,00
36	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,-

No.	Uraian	Nilai (Rp)
37	Obat	0,00
38	Obat-Obatan Lainnya	0,00
39	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00
40	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00
41	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00
42	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00
43	Natura	0,00
44	Pakan	0,00
45	Natura Dan Pakan Lainnya	0,00
46	Persediaan Penelitian Biologi	0,00
47	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00
48	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00
49	Persediaan Dalam Proses	0,00
50	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00
	JUMLAH	41.524.637,-

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD - hilang item yang tidak ada)

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
3) Aset Tetap	0,00	0,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.085.585.449,- dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.499.472.626,- dengan rincian sebagai berikut.

N o	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	11.924.469.459,-	11.362.200.709,-
(c)	Gedung dan Bangunan	473.152.967,-	473.152.967,-
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(10.312.036.977,-)	(9.335.881.050,-)
Jumlah Aset		2.764.478.859,-	3.220.804.892,-

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2025 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2024 (Rp0,00-Rp0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2025</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2024</u> <u>(Rp)</u>
a) Tanah	0,00	0,00

Saldo Tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

**Jumlah
penambahan**

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi (.....)

Koreksi	(.....) +	
	<hr/>	
Jumlah Pengurangan		(.....) +
		<hr/>

Saldo Akhir Per 31 Desember 2025

Koreksi tambah aset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
	<hr/>	
Total Koreksi Tambah	
		<hr/>

Koreksi kurang aset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
	<hr/>	
Total Koreksi Kurang		(.....)
		<hr/>

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
b) Peralatan dan Mesin	Rp. 11.924.469.450,-	Rp. 11.362.200.709,-

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 11.924.469.459,- dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada (*lampiran mutasi aset tetap 2024*)

Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Rp. 11.362.200.700,-
--------------------------------------	-----------------------------

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Alat Komunikasi Telepon	Rp	5.268.975,00	
Belanja Peralatan Studio Video dan Film	Rp	1.576.200,00	
Belanja Modal Personal Komputer	Rp	251.039.250,00	
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp	8.547.000,00	
Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp	277.211.400,00	
Belanja Mebel	Rp	2.913.750,00	
Belana Kursi Kerja Pejabat	Rp	2.913.750,00	
Belanja alat penyimpanan perlengkapan Kantor	Rp	4.662.000,00	
Belanja alat kantor lainnya	Rp	167.050.000,00	
Mutasi Kendaraan	Rp	172.200.000,00	+
Jumlah penambahan	Rp	898.382.325,00	

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Mutasi Kendaraan	Rp	164.100.000,00	
Belanja Modal Personal Computer	Rp	49.400.00,00	
Belanja Peralatan Personal Komputer	Rp	453.763.575,00	
Belanja Alat Komunikasi Telepon	Rp	473.625,00	
Mebel	Rp	2.913.750,00	
			+
Jumlah Pengurangan		(336.113.575,00.)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		Rp. 11.924.469.459	

Koreksi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 562.268.750,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp. 177.200.000,-	
- Peralatan Jaringan	Rp. 249.705.600,-	
- Alat Kantor Lainnya	Rp. 135.363.150,-	
-	
-	+
Total Koreksi Tambah		(Rp. 562.268.750,-)

Koreksi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 164.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(Rp. 164.100.000,-)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(Rp. 164.100.000,-)

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
c) Gedung dan Bangunan	473.152.967,00	473.152.967,00

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 473.152.967,- dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025 **Rp. 473.152.967,-**

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan		
Pengurangan Gedung dan Bangunan		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		Rp. 473.152.967,-

Koreksi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
Total Koreksi Tambah	

Koreksi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)
-	(.....)
-	(.....)
-	(.....)

	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi	+	
Jumlah penambahan		

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2025

Koreksi tambah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	
-	+
	<hr/>	
Total Koreksi Tambah		(.....)
		<hr/>

Koreksi kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
	<hr/>	
Total Koreksi Kurang		(.....)
		<hr/>

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
e) Aset Tetap Lainnya	644.536.863,00	644.536.863,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 644.536.863,- dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi		+
	<hr/>	
Jumlah penambahan		
Pengurangan Aset Tetap Lainnya		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
	<hr/>	
Jumlah Pengurangan		(.....) +
		<hr/>
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		Rp. 644.536.863,-

Koreksi tambah aset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
	<hr/>	
Total Koreksi Tambah	
		<hr/>

Koreksi kurang aset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)
-	(.....)
-	(.....)
-	(.....)

- (.....) +
Total Koreksi Kurang (.....)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 (*jika ada/ jika tidak ada ditulis nihil*) sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KONSTRUKSI	Nomor Kontrak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Misal:Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2				
	JUMLAH		0,00	0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
g) Akumulasi Penyusutan	10.312.036.977,-	9.335.881.050

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.312.036.977,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	<i>Peralatan Dan Mesin</i>	(10.123.758.131,-)	(9.156.800.758,-)
3	<i>Gedung dan Bangunan</i>	(188.278.846,-)	(179.080.292,-)
2	<i>Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	0,00	0,00
	JUMLAH	(10.312.036.977,-)	(9.335.881.050,-)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Per 1 Januari 2025 (Rp. 9.335.881.050,-)

Penambahan Akumulasi penyusutan

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan 966.957.373,00
Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.198.554	
Jumlah penambahan		976.155.927,00
Pengurangan Akumulasi penyusutan		
Reklasifikasi	(0.00)	
Koreksi	(0.00) +	
Jumlah Pengurangan		(0.00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		10.312.036.977,00

Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
- +	
Total Koreksi Tambah	

Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar NIHIL.

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
5) Aset Lainnya	644.536.863,-	644.536.863,-

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 644.536.863,- dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 644.536.863,- dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	644.536.863,-	644.536.863,-
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Aset		644.536.863,-	644.536.863,-

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2025 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2024 (Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
a) Aset Tak Berwujud	644.536.863,-	644.536.863,-

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan software/perangkat lunak dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025

Penambahan Aset Tak Berwujud

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan

Pengurangan Aset Tak Berwujud

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+

Jumlah Pengurangan	(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	Rp. 644.536.863,-

Koreksi tambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
	Total Koreksi Tambah

Koreksi kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
	Total Koreksi Kurang	(.....)

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
b) Aset Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 NIHIL.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan	
Pengurangan Aset Lain-lain		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	

Koreksi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
Total Koreksi Tambah	

Koreksi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+

Total Koreksi Kurang

(.....)

Rincian saldo aset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut: *(diisi sesuai data SKPD)*

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	<i>Misal:</i> Meubelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2025 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongkan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstrakomptabel) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	<i>Misal:</i> Meubelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 adalah sebesar NIHIL Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	90.803.765,-

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 90.803.765,- Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.477.389,-

No	Uraian	Nilai (Rp)
(b)	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	86.934.710,-
(c)	Utang Belanja Jasa	391.666,-
Jumlah Hutang		90.803.765,-

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar NIHIL Rp0,00.

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
c. Ekuitas	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD sebesar Rp. 2.764.478.859,-

3. Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2025 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/ Defisit Operasional.

	<u>31 Desember 2025</u> (Rp)	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)
a. Pendapatan LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar NIHIL.

No	Pendapatan Daerah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00	0,00
	- Pendapatan Pajak - LO		
	- Pendapatan Retribusi - LO		
	-		
(2)	Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		
	-.....		

(3)	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Hibah - LO		
	-.....		
Jumlah		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO yaitu sebesar Rp..... (Rp... - Rp...), perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan – LRA **Rp.**

Penambahan:

- 1. Piutang Murni (2025) Rp
- 2. Pendapatan Hibah – LO Rp
- 3. Koreksi Kurang Catat
Pendapatan - LO Rp

Jumlah Penambahan **Rp.**

Pengurangan:

- 4. Setoran Piutang tahun
sebelumnya (Rp)
- 5. Pendapatan Diterima
Dimuka (Rp)
- 6. Koreksi Lebih Catat
Pendapatan - LO (Rp)

Jumlah Pengurangan **(Rp.)**

Pendapatan - LO **Rp.**

- 1) Piutang Murni (2025) sebesar Rp terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp.
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah Rp.
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan Rp.
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah Rp.

JUMLAH **Rp.**
- 2) Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp Terdiri dari:
 - a. Rp.

b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.
JUMLAH	Rp.

3) Koreksi Kurang Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... Terdiri dari:

a.	Rp.
b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.
JUMLAH	Rp.

4) Setoran Piutang tahun sebelumnya sebesar Rp..... Terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp.
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.
JUMLAH	Rp.

5) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp..... terdiri dari:

a. Sewa Gedung Serba Guna	Rp.
b. Sewa Tanah dan Bangunan	Rp.
JUMLAH	Rp.

6) Koreksi Lebih Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... terdiri dari:

a.	Rp.
b.	Rp.
c.	Rp.
d.	Rp.
JUMLAH	Rp.

(kalau tidak ada tidak dicantumkan)

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	(Rp)	(Rp)
b. Beban	13.762.216.515,81	15.992.192.393,-

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.762.216.515,81 lebih kecil dari Rp 2.229.975.877,19 atau 13,94% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 15.992.192.393,00, dengan rincian sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.488.362.784,- lebih besar

Rp. 227.141.064,- atau 6,96% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 3.261.221.720,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Rincian Beban Pegawai - LO	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	2.247.339.651,-	1.981.634.921,-
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.241.123.133,-	1.183.526.799,-
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	96.360.000,-
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00
7.	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
8.	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00
Jumlah Total		3.488.362.784,-	1.981.634.921,-

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp. 13.762.216.515,- Tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp. 13.144.945.883,81,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 617.270.632,-,- Selisih tersebut merupakan :

Utang Beban Pegawai 2024	Rp. (90.412.099,-)
Utang Beban Barang Jasa 2024	Rp. (391.666,-)
Beban Barang Jasa/Pegawai	Rp. (118.750,-)
Pengakuan Beban Atas Beban Dibayar Dimuka	Rp. 27.848.417,-
Beban Dibayar Dimuka	Rp. (13.718.082,-)
Persediaan Awal	Rp. 48.946.986,-
Persediaan Akhir	Rp. (41.524.637,-)
Beban Penyusutan	Rp. 986.103.613,-
Belanja Modal	<u>Rp. (299.463.150,-)</u>
	Rp. 617.270.632,-

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.287.750.118,81 lebih kecil Rp. 2.547.675.199,19,- atau 21,53% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 11.835.425.318,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
1.	Beban Barang	480.376.474,00	1.342.217.490,-
2.	Beban Jasa	7.747.422.199,81	9.021.783.443,-
3.	Beban Pemeliharaan	660.073.735,-	420.311.360,-
4.	Beban Perjalanan Dinas	399.877.710,-	1.020.333.025,-

No.	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	31.080.000,-
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
7.	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Jumlah Total		9.308.636.290,81	11.835.425.318,-

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Total Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.287.750.118,81 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp. 9.266.707.850,81 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 21.042.268,- Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan penurunan umur manfaat atau potensi jasa, dan lain-lain. Selisih sebesar Rp. 21.042.268,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa – Rp9.266.707.850.81
LRA

Penambahan

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Beban dari Persediaan Awal (1 Januari 2025) Barang dan Jasa | Rp. 48.946.986.00 |
| 2 | Utang Beban Barang Jasa | Rp. 0.00 |
| 3 | Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal | Rp. 0.00 |
| 4 | Beban dibayar dimuka (beban sewa rumah jabatan/dinas) 2024 | Rp. 27.848.417.00 |
| 5 | Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah | Rp. 0.00 |
| 6 | Koreksi Lebih Catat Utang Beban Barang dan Jasa | Rp. 0.00 |

Jumlah Penambahan

Rp 76.795.403.00

Pengurangan

- | | | |
|---|--|------------------|
| 7 | Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2025) Barang dan Jasa | Rp (41.524.637.) |
| 8 | Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2024 | Rp (510.416.00.) |
| 9 | Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa | Rp (0.00.) |

10	Beban Barang dan Jasa. Beban Sewa dibayar dimuka	Rp (13.718.082.00.)	
	Jumlah Pengurangan		Rp(55.753.135)
	Beban Barang dan Jasa – LO		Rp 9.287.750.118,81

1. Beban dari Persediaan Awal sebesar Rp. 48.946.986 berasal dari:

a	Beban Alat Tulis Kantor	Rp	6.194.660,00
.			
b	Beban kertas cover	Rp	12.415.380,00
.			
c	Beban bahan cetak	Rp	16.632.226.00
.			
d	Beban bahan komputer	Rp	885.000.00
.			
e	Beban perabot kantor	Rp	5.986.770.00
.			
f	Beban alat listrik	Rp	6.832.950,00

JUMLAH **Rp 48.946.986.00**

2. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 0.00. merupakan kewajiban yang timbul pada bulan Desember 2025 dan masih harus dibayar pada bulan Januari 2026 yang nantinya akan berpengaruh pada Beban Jasa Kantor diantaranya:

a.	Utang Beban Telepon	Rp	0.00
b.	Utang Beban Air	Rp	0.00
c.	Utang Beban Listrik	Rp	0.00
d.	Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp	0.00
e.	Utang Beban Faximili, Internet	Rp	0.00
f.	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	0.00
g	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	0.00
	JUMLAH	Rp	0.00

3. Sedangkan Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar Rp. 0.00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a	Beban Bahan Habis Pakai	Rp
.	- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp
.	- dst	Rp
b	Beban Persediaan Bahan Material	Rp

- Beban Persediaan	Rp	
Bahan Baku		
Bangunan		
- dst	Rp	
c Dst		Rp
- dst	Rp	
JUMLAH		Rp 0.00.

4. Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp 13.718.082. merupakan beban sewa Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka

Uraian	Saldo (Rp)
a) Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp 13.718.082,00
Jumlah 2026	Rp 13.718.082,00

5. Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah sebesar Rp 0.00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hibah Obat-obatan	Rp 0.00.
b. Hibah Kendaraan Bermotor	Rp 0.00..
c. dst	Rp 0.00..

JUMLAH **Rp 0.00.**

6. Koreksi kurang catat utang beban barang dan jasa sebesar Rp 118.750 dengan rincian sebagai berikut.

a Utang Beban Telepon		
- Data Utang Beban Telepon awal	Rp 391.666.	
- Pembayaran Utang Beban Telepon	Rp (510.416)	
Kurang Catat Saldo Awal Beban Telepon	Rp (118.750.00)	
b Utang Beban Air		
- Data Utang Beban Air Awal	Rp 0.00	
- Pembayaran Utang Beban Air	Rp (0.00.)	
Kurang Catat Saldo Awal Beban Air	Rp	
JUMLAH	Rp (118.750.00)	

7. Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2025) Barang dan Jasa sebesar Rp 41.524.637.00 dengan rincian sebagai berikut.

a Beban Barang Pakai Habis	Rp 41.524.637.00
----------------------------	------------------

b	Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp 0.00
.		
c	Beban Barang Bekas Dipakai	Rp 0.00
.		
i.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp 0.00
-	Beban Barang Pakai Habis	Rp
-	Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp
-	Beban Barang Bekas Dipakai	Rp

JUMLAH Rp 41.524.637.00

8. Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2025 sebesar Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut.

a	Utang Beban Telepon	Rp
.		
b	Utang Beban Air	Rp
.		
c	Utang Beban Listrik	Rp
.		
d	Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp
.		
e	Utang Beban Faximili, Internet	Rp
.		
f.	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
.		

JUMLAH Rp 0.00

9. Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 0.00. dapat dijelaskan sebagai berikut.

a	Beban Barang Pakai Habis	Rp
.		
-	Beban Bahan	Rp
-	dst	Rp
b	Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp
.		
-	Beban Komponen	Rp
-	dst	Rp
c	Beban Barang Bekas Dipakai	Rp

- dst Rp

JUMLAH

Rp 0.00

10. Koreksi Lebih Catat pembebanan Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp 0.00. antara lain terdiri dari:

a Utang Beban Telepon

- Data Utang Beban Telepon awal Rp

- Pembayaran Utang Beban Telepon Rp (.....)

Lebih Catat Saldo Awal Beban Telepon Rp

b Utang Beban Air

- Data Utang Beban Air Awal Rp

- Pembayaran Utang Beban Air Rp (.....)

Lebih Catat Saldo Awal Beban Air Rp

JUMLAH

Rp 0.00

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.00 lebih besar Rp 0.00 atau 0.00 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 0.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Hibah - LO	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.	Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
4.	Beban Hibah Uang kepada BUMD	0,00	0,00
5.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00
6.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00
7.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.00 lebih

besar Rp 0.00 atau 0.00 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 0.00.dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Saldo (Tahun 2024)	Saldo (Tahun 2023)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	0,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
4.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.00 lebih besar Rp 0.00 atau 0.00% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 0.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	0,00	0,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
7.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

6) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.00 lebih besar Rp 0.00 atau 0.00 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 0.00.dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Lain-lain	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
2.	Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

7) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2025, sedangkan belanja modal tahun 2025 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2025.

Saldo beban penyusutan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 98.610.361.300 lebih besar Rp 9.055.825.800 atau 10.11% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 89.554.535.500 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyusutan	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
1.	<i>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	52.655.000,00	52.655.000,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	2.328.572,00
	- Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.322.300,00	12.673.767,00
	- Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	226.228.000,00	192.983.834,00
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	11.343.000,00	7.378.690,00
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	550.000,00	358.333,00
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.303.624,00	7.731.104,00
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	2.199.167,00
	- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.164.900,00	95.337.497,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	224.750,00	224.750,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.958.203,00	0,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	3.053.750,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	945.000,00	945.000,00
	- Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.081.250,00	2.081.250,00
	- Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	29.600.000,00	47.828.168,00
	- Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	58.543.730,00	46.296.352,00
	- Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	12.959.923,00	11.183.152,00
	- Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	218.884.360,00
	- Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	268.570.549,00	0,00
2.	<i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.562.141,00	6.562.141,00

No.	Rincian Beban Penyusutan	Saldo (Tahun 2025)	Saldo (Tahun 2024)
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.167.474,00	1.167.474,00
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.468.934,00	1.468.934,00
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.562.141,00	6.562.141,00
3.	<i>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	0,00
	- Beban Penyusutan Instalasi	0,00	0,00
	Jumlah Total	98.610.361.300	89.554.535.500

(diisi sesuai yang ada dimasing-masing SKPD/hapus item yang tidak ada)

c. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.00 lebih besar Rp 0.00 atau 0.00% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 0.00

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan sedangkan saldo tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan.

e. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.762.216.515,81 sedangkan saldo tahun 2024 sebesar Rp 15.992.192.393,00.

4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Saldo Ekuitas Awal	3.130.001.127,00	3.175.793.805,00
2.	Surplus/defisit – LO	(13.762.216.515,81)	(15.992.192.393,00)
3.	Koreksi Ekuitas	272.634.536,0	(21.991.637,00)
4.	Ekuitas akhir	2.785.365.031,00	3.130.001.127,00

Koreksi Ekuitas sebesar Rp 272.634.536 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Tambah Ekuitas :

- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 13.100.000,00	
- Peralatan Jaringan	Rp 249.705.600,00	
- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 23.268.341.00	
Total Koreksi Tambah		Rp 286.073.941.00
Koreksi Kurang Ekuitas :		
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(Rp 13.100.000.00)	
- Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(Rp 220.650.00)	
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(Rp 3.00)	
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(Rp 2.00)	
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	(Rp 118.750.00) +	
Total Koreksi Kurang		(Rp 13.439.405.00) +
Total Koreksi Ekuitas		Rp 272.634.536.00

BAB IV

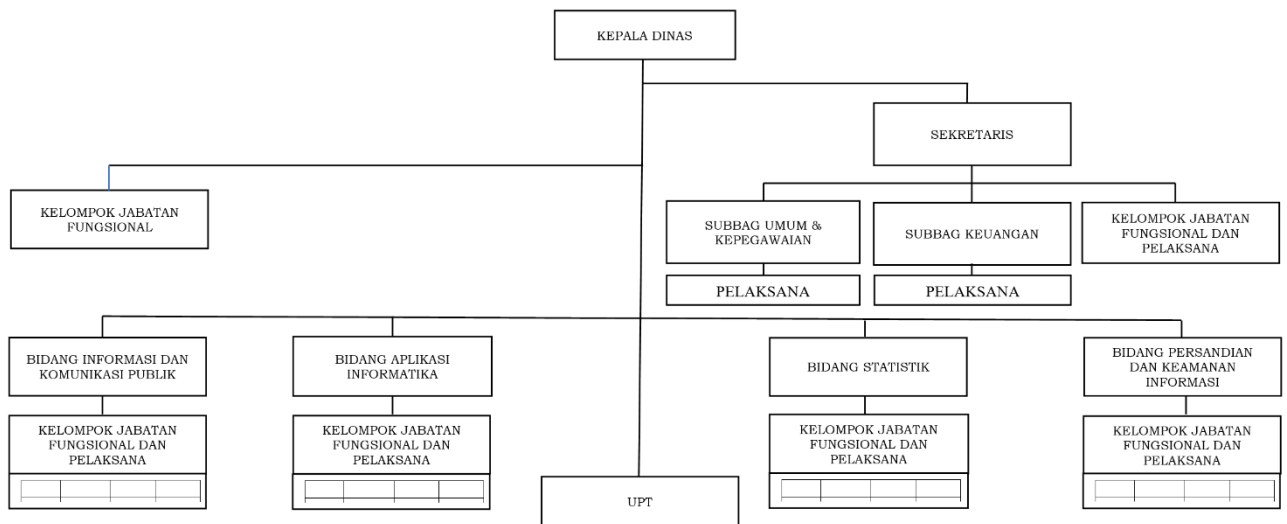
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Penjelasan Umum

a. Informasi Umum Tentang Entitas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu 3 (tiga) urusan yaitu : Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, pada Dokumen Pelaksanaan Anggarannya terdiri dari 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Sesuai dengan Perbup Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022.

b. Struktur Organisasi



BUPATI BLITAR

ttt

2. Informasi Lainnya

Selama tahun 2025 pada SKPD terjadi hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan ini, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan Setoran Kembali / Kelebihan Belanja Bayar Tagihan Internet PT.Trinity SP2D tanggal 16 Desember 2025 Nomor : 35.05/04.0/000257/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/12/2025 sebesar Rp. 7.157.649,-
2. Telah dilakukan Setoran Sisa UP Dinas Kominfo sebesar Rp. 84.227,169,-

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 dibuat sebagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban keuangan atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Selain itu, sebagai wujud nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Blitar, 31 Desember 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

AGUNG WICAKSONO, SE.,MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19761023 200212 1 008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas dilampiri Fotocopy Rekening Koran per 31 Desember 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan beserta Lampirannya
3. Daftar Inventarisasi Piutang Daerah per 31 Desember 2024
4. Daftar Inventarisasi Aset Perolehan per 31 Desember 2024 dilampiri KIB Perolehan tahun 2024 dari Simda BMD (Laporan Penatausahaan-KIB/KIR-Laporan KIB A/B/C/D-Pilih 2024)
5. Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024
6. Daftar Utang Beban yang Belum Dibayar s.d 31 Desember 2024
7. Daftar Beban Sewa Dibayar Dimuka s.d 31 Desember 2024
8. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka s.d 31 Desember 2024
9. Daftar Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga per 31 Desember 2024
10. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan s.d 31 Desember 2024
11. Daftar Hibah Barang (Aset) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2024 □ di luar Penanganan Covid-19
12. Daftar Hibah Barang (Persediaan) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2024 □ di luar Penanganan Covid-19
13. Rincian Barang ke Neraca dan Rekapitulasi Barang ke Neraca dari Simda BMD (Laporan-Akuntansi-Rincian Barang ke Neraca)
14. Rekap Perhitungan Penyusutan per 31 Desember 2023 (dari Bidang Aset)
15. Berita Acara Rekonsiliasi LRA Semester II TA 2024 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)
16. Berita Acara Rekonsiliasi BMD Semester II TA 2024 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)